

## RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Fita Apriani<sup>1</sup>, Kurniawansyah<sup>2</sup>, Ismawati<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [ismafem81@gmail.com](mailto:ismafem81@gmail.com)

### Article Info

#### Article History

Received: 02 Februari 2025

Accepted: 04 April 2025

Published: 30 April 2025

#### Keywords

Parking Retribution;

Market Retribution;

District Own Source Revenue.

### Abstrak

*This study aims to know the effect of parking retribution and market retribution on District Own Source Revenue in Sumbawa district. The type of this study was associative study. The type data used in this study was quantitative data. The source of data in this study was secondary in the form of time series. The methods used to collect data were through interviews and documentation. The data analysis tool used was multiple linear regression and the data was processed using the SPSS application. The results of the study showed the regression equation  $Y = 1.764 + 54.30X_1 - 15.032X_2 + e$ . Parking Retribution ( $X_1$ ) did not have significant effect District Own Source Revenue ( $Y$ ) in Sumbawa district it was based on the result of  $t$ -value was lower than  $t$ -table ( $1.177 < 2.353$ ). Furthermore Market Retribution ( $X_2$ ) did not have significant effect on District Own Source Revenue ( $Y$ ) in Sumbawa district, it was based the result of  $t$ -value was lower than  $t$ -table ( $1.480 < 2.353$ ). Then parking retribution and market retribution did not have significant effect on District Own Source Revenue in Sumbawa district, it was based on the result of  $f$ -value was lower than  $f$ -table ( $1.421 < 9.55$ ). The coefficient of determination or  $R$ -square was 0.144, thus the percentage effect of Parking retribution ( $X_1$ ) and Market retribution ( $X_2$ ) on District Own Source Revenue ( $Y$ ) in Sumbawa district was 14.4%, while 85.6% was affected by other variables were not studied, such as population, local taxes, inflation, and number of tourist visits.*

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami lompatan tajam dari sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam mendukung kemandirian ekonomi lokal. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing wilayah. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola urusan ekonomi dan sosial secara mandiri. Dengan otonomi yang efektif, daerah dapat lebih responsif terhadap permasalahan lokal dan lebih efisien dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan (Rizqi et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, otonomi daerah memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Daerah yang memiliki kewenangan lebih besar dapat memfokuskan kebijakan pada pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pemerintah daerah dapat mengembangkan inisiatif ekonomi hijau atau investasi pada sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, otonomi daerah menjadi pendorong penting untuk menciptakan keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan (Fatahillah et al., 2024).

Sistem otonomi daerah yang saat ini dianut oleh pemerintahan di Indonesia menghadirkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, sistem otonomi memungkinkan daerah untuk berinovasi dalam kebijakan ekonomi, seperti pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, penguatan koperasi, atau digitalisasi pelayanan publik. Pemanfaatan potensi lokal ini dapat memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Pratama *et al.*, 2025).

Meskipun demikian, implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus. Penyelenggaraan pembangunan daerah memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas, ketersediaan sumber daya alam, dan ketersediaan pembiayaan. Masalah utama yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah di Indonesia adalah keterbatasan dari tiga sumber daya tersebut. Oleh karena itu, daerah cenderung mengandalkan sumbangan dan dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam menjamin pembangunan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah itu sendiri (Rahman *et al.*, 2024).

Dalam sistem otonomi daerah yang dianut oleh pemerintahan di Indonesia saat ini, pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan pihak lainnya hanya bersifat sementara dan pelengkap. Kemandirian fiskal daerah merupakan tujuan utama pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya dengan dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasio atau derajat kemandirian keuangan suatu daerah menggambarkan bahwa semakin menurun ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah yang semakin tinggi juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan melalui otonomi daerah (Saragih dan Nurlinda, 2023).

Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pihak lain dapat memunculkan sejumlah implikasi penting bagi pengelolaan keuangan daerah. Salah satu masalah yang paling nyata adalah bahwa daerah kehilangan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan mereka. Dana Perimbangan, terutama DAU dan DAK, sering kali datang dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan alokasi anggaran dan mengalami kesulitan dalam mengembangkan program-program daerah sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Dengan demikian, ruang gerak untuk inovasi kebijakan keuangan dan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal menjadi sangat terbatas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah (Handraini *et al.*, 2024).

Oleh karena itu, dalam era otonomi saat ini pemerintah daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa berharap adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus mampu mengeksplorasi potensi sumber daya yang ada di daerahnya sebagai sumber PAD yang nantinya akan menjadi sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desanya secara mandiri. PAD bertujuan untuk memberikan kemandirian finansial kepada pemerintah daerah agar dapat mendanai otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa bergantung pada pemerintah pusat (Nurdyastuti *et al.*, 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen penting dalam struktur APBD dan menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang diperoleh dari potensi dan sumber daya yang ada di wilayah daerah itu sendiri, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis PAD yang mempunyai peranan strategis sebagai sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya sendiri. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada prinsipnya, fungsi utama pemungutan retribusi adalah hampir sama dengan pajak, yaitu sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah (Hingide *et al.*, 2023).

Retribusi Daerah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum. Retribusi parkir adalah pungutan daerah yang dikenakan atas penggunaan jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Tarif retribusi parkir ditentukan berdasarkan jenis kendaraan bermotor. Retribusi ini berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hasilnya digunakan kembali untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana layanan publik lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat (Rumengan *et al.*, 2020).

Selain retribusi parkir, retribusi pasar juga termasuk ke dalam Retribusi Daerah dari jenis retribusi jasa umum dan menjadi salah satu sumber PAD. Retribusi pasar adalah pembayaran yang dikenakan kepada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai biaya atas penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pasar, seperti kios, los, pelataran, dan fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan strategis dalam pembiayaan pembangunan daerah dan merupakan sumber asli pendapatan daerah yang dapat berperan dalam kegiatan pembiayaan pembangunan daerah (Darmawati *et al.*, 2024).

Otonomi daerah telah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk mengelola potensi dan sumber daya mereka secara mandiri, namun keberhasilan implementasi otonomi daerah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan mendukung keberlanjutan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal, sehingga peningkatan SDM menjadi prioritas untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. Selain itu, otonomi daerah memperkuat demokrasi lokal melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan membuka peluang bagi kepemimpinan lokal yang inklusif dan berbasis kinerja untuk merancang strategi pembangunan sesuai potensi wilayah masing-masing.

Kemandirian daerah untuk membiayai pembangunan di daerahnya melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), seperti retribusi parkir dan retribusi pasar menjadi langkah-langkah kunci yang perlu diambil untuk memaksimalkan manfaat otonomi daerah. Melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), otonomi dapat menjadi landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

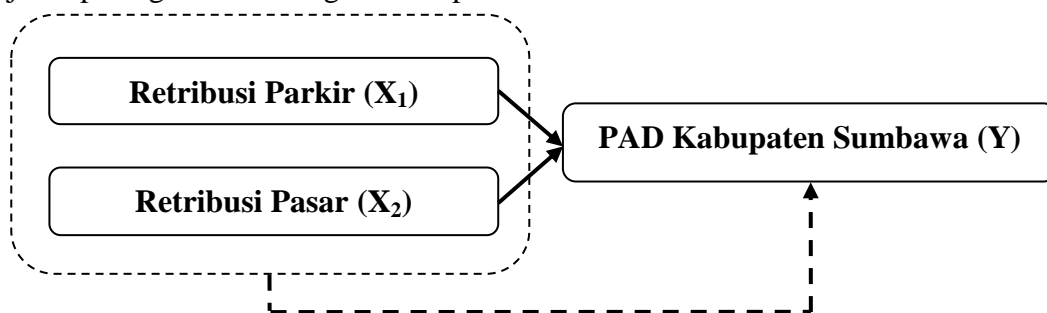
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang **Retribusi Parkir Dan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa**. Secara sederhana, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah retribusi parkir dan retribusi pasar berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa, baik secara parsial maupun secara simultan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Darmanah (2019) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian asosiatif digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, yang pada penelitian ini variabel independen terdiri atas Retribusi Parkir ( $X_1$ ) dan Retribusi Pasar ( $X_2$ ), variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 ( $Y$ ).

Berdasarkan hasil pengkajian literasi dan empiris, maka desain penelitian ini dapat disajikan pada gambar kerangka konseptual berikut ini.



**Gambar 1. Desain Penelitian**

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sugiyono (2021) menyatakan bahwa data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian berupa data retribusi parkir, retribusi pasar, dan PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 yang disajikan dalam bentuk angka-angka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2021). Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literature. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan oleh peneliti dari dokumen atau arsip yang sudah ada berupa laporan-laporan yang terdapat pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, baik yang sudah dipublikasikan atau belum.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Dalam pengumpulan data, informasi, atau fakta-fakta di lapangan ada bermacam-macam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Pada penelitian, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data sekunder, yaitu cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Menurut Arikunto (2019), teknik dokumentasi adalah suatu cara yang

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang data retribusi parkir, retribusi pasar, dan PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 yang terdokumentasi di web Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Retribusi Parkir ( $X_1$ ) dan Retribusi Pasar ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 ( $Y$ ). Seluruh data mengenai Retribusi Parkir ( $X_1$ ), Retribusi Pasar ( $X_2$ ) dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 ( $Y$ ) dikumpulkan dari dokumen yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa untuk diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS dan dikaji menggunakan teknik yang meliputi analisis regresi linier berganda, uji hipotesis parsial (uji  $t$ ), uji hipotesis simultan (uji  $F$ ), dan uji koefisien determinan ( $R^2$ ) (Ghozali, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengkajian pengaruh Retribusi Parkir ( $X_1$ ) dan Retribusi Pasar ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 ( $Y$ ). Adapun data mengenai retribusi parkir, retribusi pasar, dan PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1. Data Retribusi Parkir, Retribusi Pasar, dan PAD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2023**

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	PAD (Rp)
2018	166.975.000,00	2.306.412.370,00	143.966.209.095,24
2019	201.495.000,00	1.322.519.112,00	163.931.325.230,96
2020	245.375.000,00	1.149.913.090,00	181.312.520.391,99
2021	358.164.800,00	1.782.210.450,00	163.931.325.230,96
2022	350.974.000,00	2.451.536.500,00	172.069.779.307,35
2023	472.226.000,00	1.995.465.000,00	165.312.552.379,70

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa retribusi parkir, retribusi pasar, dan PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Peneliti menduga bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi retribusi parkir dan retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Penyebab lainnya adalah aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat yang tidak stabil sehingga menyebabkan ketidakstabilan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir dan retribusi pasar.

### Hasil Analisis Data

#### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2021), analisis regresi berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik analisis

regresi linear berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Retribusi Parkir ( $X_1$ ) dan Retribusi Pasar ( $X_2$ ) terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 ( $Y$ ). Berdasarkan hasil pengujian dengan bantuan aplikasi SPSS, diperoleh nilai koefisien regresi yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.764	2.049		8.607	.003
	Retribusi Parkir	.301	.139	.506	1.177	.324
	Retribusi Pasar	.032	.155	.636	1.480	.235

a. Dependent Variable: PAD Kabupaten Sumbawa

Sumber: Output SPSS, 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$\text{PAD} = 1.764 + 0.301 (\text{Retribusi Parkir}) + 0.032 (\text{Retribusi Pasar}) + e$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai constanta ( $a$ ) sebesar 1.764. Nilai ini merupakan angka konstan yang berarti bahwa apabila nilai variabel-variabel independen yang terdiri atas Retribusi Parkir ( $X_1$ ) dan Retribusi Pasar ( $X_2$ ) tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan (0), maka nilai variabel dependen PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 ( $Y$ ) adalah konstan sebesar 1.764.
- Nilai  $\beta_1$  koefisien regresi variabel Retribusi Parkir ( $X_1$ ) adalah sebesar 0.301 dan bernilai positif. Nilai positif menunjukkan hubungan yang searah (berbanding lurus) yang berarti bahwa jika nilai variabel Retribusi Parkir ( $X_1$ ) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai variabel PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 ( $Y$ ) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.301. Demikian pula sebaliknya, dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya, yaitu tingkat Retribusi Pasar ( $X_2$ ) adalah konstan (0).
- Nilai  $\beta_2$  koefisien regresi variabel Retribusi Pasar ( $X_2$ ) adalah sebesar 0.032 dan bernilai positif. Nilai positif menunjukkan hubungan yang searah (berbanding lurus) yang berarti bahwa jika nilai variabel Retribusi Pasar ( $X_2$ ) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka nilai variabel PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 ( $Y$ ) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.032. Demikian pula sebaliknya, dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya, yaitu Retribusi Parkir ( $X_1$ ) adalah konstan (0).

## 2. Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Pengujian menggunakan taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0.05$ ). Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat secara parsial dengan kriteria nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) serta nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari  $\alpha$  0.05 ( $\alpha < 0.05$ ).

Uji t digunakan pada penelitian ini untuk melihat signifikan pengaruh Retribusi Parkir ( $X_1$ ) dan Retribusi Pasar ( $X_2$ ) terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 (Y). Hasil pengujian hipotesis parsial (uji-t) yang telah dilakukan pada penelitian dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.764	2.049		8.607	.003
Retribusi Parkir	.301	.139	.506	1.177	.324
Retribusi Pasar	.032	.155	.636	1.480	.235

a. Dependent Variable: PAD Kabupaten Sumbawa

Sumber: Output SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial (uji-t) yang disajikan pada tabel diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar 1.177, sedangkan nilai  $t_{tabel}$  pada derajat kebebasan ( $df=n-k=6-3=3$ ) dan  $\alpha = 5\%$  (0.05) adalah sebesar 2.353, sehingga nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada nilai  $t_{tabel}$  ( $1.177 < 2.353$ ). Adapun nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0.324 lebih besar dari 0.05 ( $0.324 > 0.05$ ). Dengan demikian, maka hasil ini menunjukkan bahwa retribusi parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023.

b. Pengaruh Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel di atas, diketahui nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar 1.480, sedangkan nilai  $t_{tabel}$  pada derajat kebebasan ( $df=n-k=6-3=3$ ) dan  $\alpha = 5\%$  (0,05) adalah sebesar 2.353, sehingga nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada nilai  $t_{tabel}$  ( $1.480 < 2.353$ ). Adapun nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0.235 lebih besar dari 0.05 ( $0.235 > 0.05$ ). Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa retribusi pasar secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023.

### 3. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2021), uji simultan atau uji F ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan kesimpulan pada uji F ialah jika nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $F_{tabel}$  ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) dan nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari  $\alpha$  0.05 ( $< 0.05$ ), maka variable independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Uji F pada penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen yang terdiri atas Retribusi Parkir ( $X_1$ ) dan Retribusi Pasar ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 (Y). Berikut disajikan hasil perhitungan uji hipotesis simultan atau uji F menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

**Tabel 3. Hasil Hipotesis Parameter Simultan (Uji-F)**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37.009	2	18.504	1.421	.368 <sup>b</sup>
	Residual	39.075	3	13.025		
	Total	76.084	5			
a. Predictors: (Constant), Retribusi Pasar, Retribusi Parkir						
b. Dependent Variable: PAD Kabupaten Sumbawa						

Sumber: Output SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis simultan (uji F) yang disajikan dalam tabel diatas, diketahui nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 1.421, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  pada derajat kebebasan ( $df_1=k-1=3-1=2$ ) dan ( $df_2=n-k=6-3=3$ ) sebesar 9.55, sehingga nilai  $F_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $F_{tabel}$  ( $1.421 < 9.55$ ). Adapun nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0.368 lebih besar dari 0.05 ( $0.368 > 0.05$ ). Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa retribusi parkir dan retribusi pasar secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023.

#### 4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2021), koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi diindikasikan dengan nilai *Adjusted R-Square*. Besarnya nilai *Adjusted R-Square* berada antara 0 -1. Jika nilai *Adjusted R-Square* semakin mendekati satu, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen yang terdiri atas Retribusi Parkir ( $X_1$ ) dan Retribusi Pasar ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 (Y). Berikut disajikan hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.697 <sup>a</sup>	.486	.144	11412724528.965
a. Predictors: (Constant), Retribusi Pasar, Retribusi Parkir				
b. Dependent Variable: PAD Kabupaten Sumbawa				

Sumber: Output SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang disajikan dalam tabel diatas, diketahui nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diindikasikan oleh nilai *Adjusted R-Square* adalah sebesar 0.144. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri atas retribusi parkir dan retribusi pasar

dalam mempengaruhi PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 adalah sebesar 14.4%, sedangkan sisanya sebesar 85.6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini, seperti jumlah penduduk, pajak daerah, inflasi, dan jumlah kunjungan wisatawan (Theresia *et al.*, 2024).

## **Pembahasan**

Dalam penelitian ini, diduga faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Sumbawa adalah retribusi parkir dan retribusi pasar. Berikut diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa**

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi PAD Kabupaten Sumbawa adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum. Retribusi parkir adalah pungutan daerah yang dikenakan atas penggunaan jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Tarif retribusi parkir ditentukan berdasarkan jenis kendaraan bermotor. Retribusi ini berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hasilnya digunakan kembali untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana layanan publik lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat (Rumengan *et al.*, 2020).

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa retribusi parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023. Hal ini mengandung arti bahwa penerimaan dari sektor retribusi parkir belum mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumbawa. Hal itu dikarenakan penerimaan dari sektor parkir masih dianggap sebagai sumber pendapatan marjinal dengan kontribusi yang relatif rendah terhadap total PAD Kabupaten Sumbawa. Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi masalah dalam pengelolaan penerimaan dari sektor parkir, ditambah pendapatan parkir seringkali hilang disebabkan banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh petugas juru parkir sehingga menghambat efektivitas penerimaan dari sektor parkir.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat potensial bagi pendapatan asli daerah (PAD). Potensi penerimaan dari sektor retribusi parkir terus meningkat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan jumlah kendaraan yang terus bertambah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi ini dengan menerapkan strategi pengelolaan yang tepat dan efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, daerah dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor retribusi parkir sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai program-program yang mendukung pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil studi yang dilakukan oleh Vaningsiau dan Prayitno (2023) yang menunjukkan bahwa retribusi parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik Periode 2019-2021. Retribusi parkir memiliki kontribusi yang rendah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik. Masalah tata kelola dan akuntabilitas masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan anggaran retribusi parkir. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan, termasuk manajemen anggaran yang transparan dan efektif, menjadi kebutuhan yang mendesak agar potensi sektor retribusi parkir dapat diterima secara optimal.

## **Pengaruh Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Sumbawa**

Faktor lain yang diduga mempengaruhi PAD Kabupaten Sumbawa adalah retribusi pasar. Retribusi pasar juga termasuk ke dalam Retribusi Daerah dari jenis retribusi jasa umum dan menjadi salah satu sumber PAD. Retribusi pasar adalah pembayaran yang dikenakan kepada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai biaya atas penggunaan atau pemanfaatan fasilitas pasar, seperti kios, los, pelataran, dan fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempunyai peranan strategis dalam pembiayaan pembangunan daerah dan merupakan sumber asli pendapatan daerah yang dapat berperan dalam kegiatan pembiayaan pembangunan daerah (Darmawati *et al.*, 2024).

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa retribusi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023. Artinya, penerimaan dari sektor retribusi pasar belum mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumbawa. Potensi retribusi pasar belum dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, kurangnya atau lemahnya sistem pengawasan masih menjadi kendala dalam pengelolaan pemungutan retribusi pasar sehingga kontribusi penerimaan dari sektor retribusi pasar masih relatif rendah terhadap total PAD Kabupaten Sumbawa.

Retribusi pelayanan pasar atau retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang memiliki peranan penting terhadap PAD. Pasar memiliki peran penting bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumbawa, karena menjadi salah satu pemasok segala jenis barang dan jasa yang dijual kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan agar dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi retribusi pasar sebagai sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah, salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan dan pelaporan untuk mengoptimalkan pungutan retribusi pasar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi Rachman, *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa retribusi pelayanan pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2019. Hal itu disebabkan antara lain oleh perilaku wajib retribusi yang cenderung menunda pembayaran retribusi pasar dengan berbagai alasan, serta masih ada banyak petugas parkir yang belum memiliki izin resmi dari instansi yang bersangkutan, sehingga penerimaan yang didapatkan tidak bisa optimal. Permasalahan tersebut berimbas pada tidak tercapainya target total penerimaan retribusi pelayanan pasar tiap tahunnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Retribusi parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023.
2. Retribusi pasar secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023.
3. Retribusi parkir dan retribusi pasar secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023.
4. Kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri atas retribusi parkir dan retribusi pasar dalam mempengaruhi PAD Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2023 adalah sebesar 14.4%, sedangkan sisanya sebesar 85.6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini, seperti jumlah penduduk, pajak daerah, inflasi, dan jumlah kunjungan wisatawan.

## SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dalam rangka meningkatkan PAD terutama dari hasil retribusi parkir dan retribusi pasar. Pemerintah daerah harus dapat menggali secara optimal seluruh potensi yang ada di daerahnya, diantaranya yang bersumber dari sektor retribusi parkir dan retribusi pasar, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan ataupun menambah variabel independen yang berbeda, seperti jumlah penduduk, pajak daerah, inflasi, jumlah kunjungan wisatawan dan faktor lainnya yang diduga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmanah, G. (2019). *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV. Hira Tech.
- Darmawati, Damirah, Nurhayati, S., Semaun, S., & Adani, A.P.Z. (2024). Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 6(1): 1-15.
- Fatahillah, F., Arnita, A., & Nurarafah, N. (2023). Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6): 709-721.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi Kesepuluh)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handraini, H., Frinald, A., Asnil, & Putri, N.E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 11(2): 593-600.
- Hingide, S., Kawung, G.M.V., & Maramis, M.T.B. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(9): 145-156.
- Nurdyastuti, T., Suroto, & Rodiza, M.R. (2024). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Soloraya: Peran Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. *Excellent: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Pendidikan*, 11(2): 137-148.
- Pratama, A.T., Putri, D.G., Mayasari, M., & Malik, A. (2025). Tantangan Dan Peluang Otonomi Daerah Dalam Mendukung Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Kalianda Halok Gagas*, 8(1): 1-16.



- Rachman, D., Iqbal, M., & Rahayu, N.S. (2021). Pengaruh Retribusi Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2019. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(1): 117-130.
- Rahman, D.A., Abubakar, M.B., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3): 183-194.
- Rumengan, V.K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5): 1-9.
- Rizqi, K. F., Nuris, S. A., & Hayat, A. (2024). Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Berbasis Kebijakan Desentralisasi Fiskal. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis*, 4(1): 64-90.
- Saragih, R., & Nurlinda. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(2): 1-11.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, B.Y., Ivonne, F.L., Anggreni, R., & Putra, A.R. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi D.I Yogyakarta. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 9(1): 1-22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
- Vaningsiau, P.A., & Prayitno, B. (2023). Analisis Jumlah Pengunjung dan Retribusi (Parkir) Kawasan Wisata Religi Sunan Giri terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten Gresik Periode 2019-2021. *ECONOMIE*, 5(1): 44-55.